

Katalog: 9302023.3301



PDRB

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN CILACAP**

**MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2016 -2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP**



Katalog BPS : 9302023.3301

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN CILACAP
MENURUT PENGELUARAN
2016 - 2020**

<https://cilacapkab.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN CILACAP MENURUT PENGELUARAN 2016 – 2020

Gross Regional Domestic Product of Cilacap Regency by Expenditure 2016-2020

ISSN/ISBN:

Nomor Publikasi/ Publication Number: 33010.2103

Katalog BPS/ BPS Catalogue: 9302023.3301

Ukuran Buku/ Book Size: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman/Total pages : viii + 52 halaman

Naskah/ Script:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap/
Statistic Indonesia of Cilacap Regency

Gambar Kulit/ Cover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap/
Statistic Indonesia of Cilacap Regency

Diterbitkan Oleh/ Published By:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap/
Statistic Indonesia of Cilacap Regency

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap/ *Statistic Indonesia of Cilacap Regency*

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited announce, distibute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this
book for commercial purposes wihout the written permission of the Central Bureau of
Statistic.*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN CILACAP
MENURUT PENGELUARAN
2016 - 2020**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Toto Desanto, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Solikhin, SST, M.Si

Penyunting : Solikhin, SST, M.Si

Penulis : Hendrat Priyotomo, S.ST

: Rahmawati, S.ST

Pengolah Data : Hendrat Priyotomo, S.ST

<https://cilacapkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Cilacap, April 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP,

Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Info Grafis.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
B. Kegunaan Statistik PDRB.....	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	6
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	9
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	12
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
E. Perubahan Inventori	19
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN CILACAP	25
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Cilacap menurut Pengeluaran	27
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	32
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	34
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	35
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	36
F. Perkembangan Perubahan Inventori	37
G. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	38
BAB IV PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN CILACAP MENURUT PENGELUARAN	40

A. PDRB (Nominal)	41
B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	42
C. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	43
D. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	43
BAB V PENUTUP	46
LAMPIRAN	48

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Miliar Rp</i>)	27
Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Miliar Rp</i>)	28
Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	30
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020(<i>Persen</i>)	31
Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (<i>Persen</i>)	32
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2016-2020	33
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Tahun 2016-2020 (<i>Miliar Rp</i>)	34
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2016-2020 (<i>Miliar Rp</i>)	35
Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran PMTB Tahun 2016-2020	36
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2016-2020....	37
Tabel 11. Net Eksport Antar Daerah Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2016-2020	41
Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016-2020	42
Tabel 14. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2016-2020.....	43
Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio Tahun 2016-2020	44

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	29

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>)	49
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (<i>Juta Rupiah</i>)	49
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>)	50
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (<i>Persen</i>) ...	50
Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Pengeluaran (Tahun 2010=100)	51
Lampiran 6. Laju Perubahan Indeks Impilisit Produk Domestik Regional Bruto Kab. Cilacap Menurut Pengeluaran (Tahun 2010 = 100) (<i>Persen</i>)	51

POTRET EKONOMI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

PANDEMI

CORONA

**Ekonomi Kabupaten Cilacap
Tahun 2020 Mengalami
Kontraksi Sebesar**

-10,36%



Jawa Tengah

Banyumas -2,65%

-1,65%

Purbalingga

-1,23%

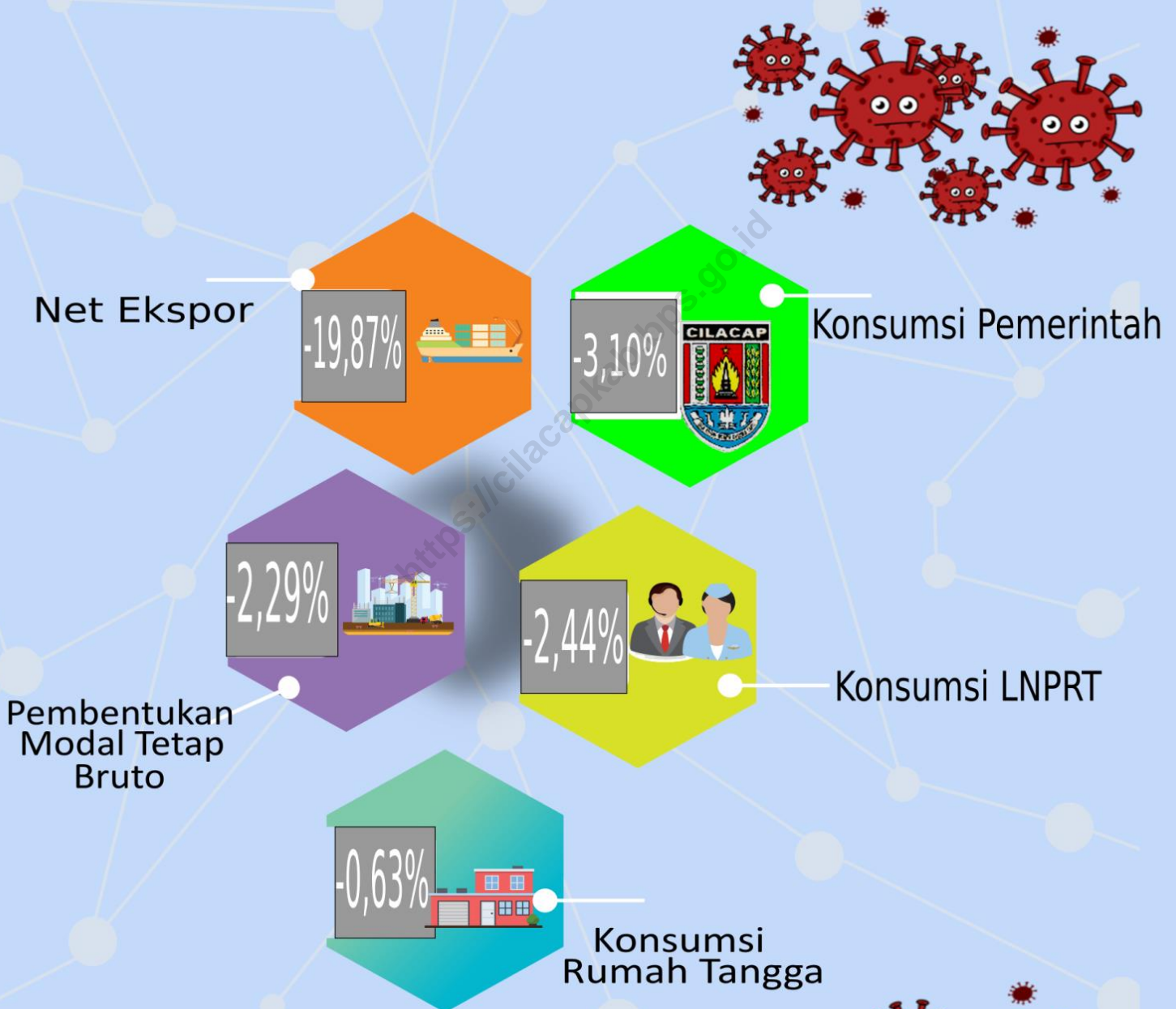


Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap 2016-2020



2020

Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap Menurut Komponen Pengeluaran



Bab I

Pendahuluan

<https://cilacapkab.bps.go.id>

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan,

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/*daerah/region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Bab II

Metode Estimasi dan Sumber Data

<https://cilacapkab.bps.go.id>

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT *adh Berlaku*. PKRT *adh Konstan 2010*, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT *adh Berlaku* dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan;
5. Menyusun Indeks Harga Implisit berdasarkan IHK Provinsi dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPR) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT *adh Berlaku*. PKLNPRT *adh Konstan 2010*, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT *adh Berlaku* dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya

seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku=

Output non pasar–penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk tingkat Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal

seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang

dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh berlaku* atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh Konstan*, maka PMTB *adh Berlaku* tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan men-*deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung

PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di *reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong.

Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir

dengan IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia;
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;

- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei;
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia;

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

Bab III

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Cilacap

<https://cilacapkab.bps.go.id>

Berbagai negara mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Tercatat pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan berkontraksi hingga minus 5,32 persen secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. “Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, ungkap Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho dalam <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>.

Pada kuartal IV, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat sebesar -2,19 persen secara year on year. Sedangkan pertumbuhan di kuartal IV secara q to q mengalami kontraksi -0,42 persen. Pada kuartal ke IV ada 10 sektor yang mengalami kontraksi walaupun tidak sedalam kuartal sebelumnya, contohnya pada sektor transportasi dan pergudangan pada triwulan II mengalami kontraksi 30,8 persen dan pada triwulan IV menunjukkan arah pemulihan yaitu kontraksi sebesar 13,42 persen.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi 2,65. Kondisi perekonomian Jawa Tengah berdasarkan PDRB menurut pengeluaran kontraksi tertinggi dialami oleh sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,98 persen.

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Cilacap berdasarkan PDRB Pengeluaran tidak luput mengalami kontraksi sebesar 10,36 persen dari pertumbuhan 2,27 persen tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional yang sama-sama mengalami kontraksi di tahun 2020. Pengaruh besar perubahan perekonomian Kabupaten Cilacap adalah dikarenakan kontraksi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi LNPRT, PMTB dan nett Ekspor.

Pertumbuhan ekonomi Cilacap berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, penyajiannya berbeda dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Lapangan Usaha yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Untuk PDRB Kabupaten Cilacap menurut pengeluaran

pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah pertumbuhan PDRB secara keseluruhan yaitu yang di dalamnya termasuk komponen minyak.

Karena nilai hasil pengolahan kilang minyak Pertamina Cilacap mempunyai pengaruh cukup besar terhadap peningkatan maupun pelambatan pertumbuhan ekonomi Cilacap, maka untuk mengukur keterbandingan ekonomi wilayah antar kabupaten kota agar relevan, maka biasanya yang dipakai adalah PDRB yang tanpa minyak. Apabila menggunakan PDRB Pengeluaran maka pertumbuhannya bisa sangat fluktuatif, karena hasil industri pengolahan minyak, sangat dipengaruhi oleh situasi harga pasar minyak mentah dunia sebagai bahan bakunya. Apabila bedasarakan PDRB Kabupaten Cilacap menurut Lapangan Usaha tanpa minyak, maka kontraksi ekonomi pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,35 persen.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN CILACAP MENURUT PENGELUARAN

PDRB ini terbentuk dari komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPR (PKLNPR), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor, termasuk ekspor dan impor antar daerah.

Besaran nilai PDRB Pengeluaran digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku maupun atas dasar harga (adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	36.776,93	39.572,39	42.157.156,77	44.852.410,48	44.847.179,43
2. Konsumsi LNPR	442,23	481,05	522.167,59	588.510,23	582.627,06
3. Konsumsi Pemerintah	2.884,28	3.073,75	3.188.798,76	3.282.346,90	3.121.203,24
4. PMTB	16.925,08	18.507,74	20.532.759,26	22.625.435,17	22.137.165,68
5. Perubahan Inventori	256,87	441,95	568.893,39	431.576,00	486.088,86
6. Net Ekspor	41.748,17	41.844,89	42.729.882,98	42.306.048,77	33.861.760,81
Total PDRB	99.033,57	103.921,78	109.699.658,75	114.086.327,55	105.036.025,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Cilacap adh Berlaku selama periode tahun 2016 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan pengecualian tahun 2020 mengalami kontraksi. Kontraksi nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga

perubahan volume tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan . Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020
(Miliar Rupiah)

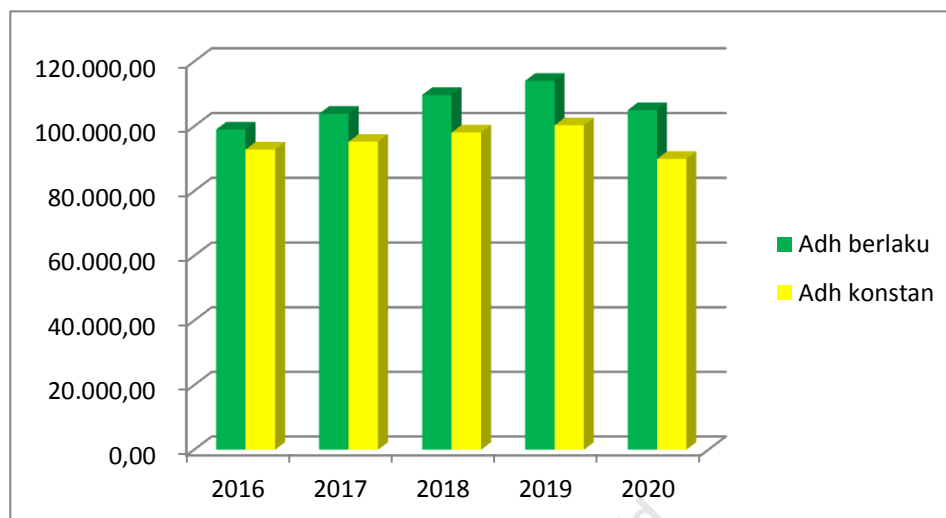
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	28.895,72	30.198,46	31.515.920,20	32.597.205,82	32.393.078,69
2. Konsumsi LNPRT	315,62	332,55	352.278,85	387.975,82	378.526,28
3. Konsumsi Pemerintah	1.910,44	1.966,87	2.002.370,69	2.050.325,99	1.986.806,21
4. PMTB	12.641,35	13.486,91	14.297.527,58	15.151.201,29	14.804.527,74
5. Perubahan Inventori	354,86	376,56	346.438,64	353.583,02	478.063,96
6. Net Ekspor	48.740,66	48.893,24	49.586.032,21	49.788.146,81	39.893.717,59
Total PDRB	92.858,65	95.254,59	98.159,05	100.445,73	89.934,72

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan PDRB Pengeluaran adh Konstan tahun 2010, total nilai PDRB Pengeluaran dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. Namun secara umum peningkatan total PDRB adh Berlaku persentasinya lebih besar daripada PDRB adh Konstan, hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan PDRB adh Berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB adh Konstan. Dari tabel 1 maupun tabel 2 terlihat bahwa komponen ekspor Cilacap yaitu dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan (output) lebih banyak yang mengalir ke luar wilayah, secara nominal nilainya lebih tinggi atau setara dibanding dengan nilai total PDRBnya.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020



Dari grafik di atas, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh perubahan harga tidak ada karena menggunakan satu harga yaitu harga tahun dasar.

Guna melihat seberapa jauh peranan masing-masing komponen pengeluaran dalam pembentukan PDRB menurut Pengeluaran di suatu wilayah dari tahun ke tahun, dapat dilihat melalui struktur komponen PDRB pengeluaran. Dari Tabel 3 terlihat bahwa struktur ekonomi Cilacap masih didominasi oleh nilai ekspor (net ekspor). Meskipun dalam kurun lima tahun terakhir distribusinya menunjukkan trend yang semakin berkurang, namun nilai ekspornya besarnya mendekati total nilai PDRB, bahkan nilai komponen pengeluaran net ekspor sampai tahun 2020 hampir sepertiga nilai total PDRB Kabupaten Cilacap. Ini menunjukkan bahwa hasil-hasil yang utamanya dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Cilacap seperti hasil pengolahan minyak, semen, pupuk, makanan/bahan makanan lebih banyak yang di ekspor ke luar wilayah. Selain komponen Net ekspor, komponen lain yang mempunyai peranan besar terhadap PDRB pengeluaran Cilacap adalah sumbangan dari konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

**Tabel 3. Distribusi PDRB Adh Berlaku
menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	37,14	38,08	38,43	39,31	42,70
2. Konsumsi LNPRT	0,45	0,46	0,48	0,52	0,55
3. Konsumsi Pemerintah	2,91	2,96	2,91	2,88	2,97
4. PMTB	17,09	17,81	18,72	19,83	21,08
5. Perubahan Inventori	0,26	0,43	0,52	0,38	0,46
6. Net Ekspor	42,16	40,27	38,95	37,08	32,24
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Apabila faktor minyak dikeluarkan dari komponen PDRB, sebetulnya peran pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) merupakan yang terbesar proporsinya dalam struktur PDRB Kabupaten Cilacap. Sejak tahun 2010 proporsi PKRT pada kisaran 37-42 persen dari total PDRB pengeluaran. Sedangkan apabila komponen minyak dikeluarkan maka komposisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) tercatat pada kisaran angka 68-70 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Cilacap masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sementara Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) peranannya masih relatif kecil di dalam PDRB Pengeluaran Cilacap.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Seperti disampaikan di awal penjelasan bab ini bahwa, karena di Cilacap keberadaan kilang minyak hasilnya sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka dalam penghitungan PDRB Lapangan Usaha dibedakan menjadi PDRB dengan minyak dan PDRB tanpa minyak. PDRB yang sering dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Cilacap adalah PDRB yang tanpa minyak. Hal ini untuk lebih menggambarkan perekonomian Cilacap dan memudahkan melihat keterbandingan dengan kabupaten lain.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Adh Konstan 2010
menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PDRB E /PDRB LU dengan minyak	5,96	5,09	2,58	2,99	2,27	-10,36
4. PDRB LU tanpa minyak	5,55	5,09	5,33	5,14	5,23	-1,35

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap berdasarkan PDRB baik dengan minyak maupun tanpa minyak dari tahun 2015– 2020. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB dengan minyak sangat fluktuatif di mana harga minyak dunia dan besaran subsidi sangat berpengaruh terhadap total nilai PDRB Cilacap. Tahun 2017 dan 2020 harga minyak dunia mengalami penurunan dikarenakan terpaan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sementara produksi/pengolahan minyak nasional juga menurun, seiring dengan itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi terhadap beberapa jenis produk BBM. Akibat kondisi tersebut maka pertumbuhan PDRBnya mengalami perlambatan di tahun 2018 dengan tumbuh 2,99 persen dan kemudian melemah di tahun 2019 dengan tumbuh 2,27 persen dan kontraksi di tahun 2020 sebesar 10,36. Sementara kalau berdasarkan PDRB tanpa minyak maka pertumbuhan ekonomi Cilacap dalam kurun waktu 4 tahun terakhir relatif terjaga pada kisaran di atas 5 persen kecuali pada tahun 2020 resesi ekonomi dikarenakan pandemi kontraksi sebesar 1,35 persen. Ini juga sejalan dengan situasi perekonomian Nasional maupun Jawa Tengah yang mengalami kontraksi di atas 2 persen.

Perlambatan perekonomian Kabupaten Cilacap di tahun 2020 berdasarkan PDRB Pengeluaran karena disebabkan kontraksi yang sangat tinggi pada komponen net ekspor sebagai efek resesi ekonomi dikarenakan imbas pandemi.

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2016 - 2020
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	127,27	131,04	133,76	137,60	138,45
2. Konsumsi LNPR	140,12	144,66	148,23	151,69	153,92
3. Konsumsi Pemerintah	150,97	156,28	159,25	160,09	157,10
4. PMTB	133,89	137,23	143,61	149,33	149,53
5. Net Ekspor	85,65	85,58	164,21	122,06	101,68
<i>Total PDRB</i>	106,65	109,10	111,82	113,71	116,79

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5 menjelaskan gambaran tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Dari Tabel 5 dapat diketahui gambaran tingkat perubahan harga yang terjadi melalui angka indeks harga implisit PDRB.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan tingkat perubahan harga sangat berpengaruh terhadap kenaikan total nilai PDRB.

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang cukup signifikan dalam PDRB Kabupaten Cilacap menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam kurun waktu 2016 - 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu juga, tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga terutama konsumsi non makanan. Sedangkan pada tahun 2020, konsumsi

akhir rumah tangga mengalami penurunan baik dalam nominal maupun riil. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	36.776,93	39.572,39	42.157,16	44.852,41	44.847,18
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	28.895,72	30.198,46	31.515,92	32.597,21	32.393,08
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	37,14	38,08	38,43	39,31	42,7
Pertumbuhan (% ADHK)	3,63	4,51	4,36	3,43	-0,63

Selama periode 2016 - 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tercatat pada kisaran 37-42 persen, di mana tahun 2019 proporsinya mencapai 39,28 persen, sementara di tahun 2020 proporsinya meningkat menjadi 42,7 persen. Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan total konsumsi rumah tangga terjadi fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2016 konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,63 persen, dan tahun 2019 tumbuh 4,10 persen, akan tetapi di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen.

Dalam waktu 5 tahun terakhir rata-rata peningkatan konsumsi rumah tangga adalah 3,06 persen secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Secara umum, konsumsi rumah tangga baik menurut Adh Berlaku maupun Adh Konstan sejak tahun 2010 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 total pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Rumah Tangga Adh Berlaku sebesar 23.687,80 (miliar rupiah), sampai tahun 2020 nilai pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencapai 44.847,17 (miliar rupiah). Peningkatan tersebut juga bisa dilihat berdasarkan Adh Konstan di mana pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2010 tercatat sebesar 23.687,80 (miliar rupiah) dan di tahun 2019 tercatat sebesar 32.597,21 (miliar rupiah) kemudian turun sedikit di tahun 2020 menjadi sebesar 32.393,08 (miliar rupiah).

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu masih pada kisaran kurang dari 1 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Besaran konsumsi LNPRT dapat pula disebabkan adanya kegiatan yang berskala regional maupun nasional seperti penyelenggaraan pemilu/pilkada, munas maupun even tertentu. Pada kegiatan pemilu dan pilkada serentak peningkatan konsumsi LNPRT meningkat cukup signifikan, khususnya pada organisasi partai politik yang pengeluarannya relatif besar. Sementara bagi kota-kota yang sering ketempatan penyelenggaraan munas suatu organisasi, even olah raga atau seni budaya, pengaruhnya terhadap pertumbuhan konsumsi LNPRT cenderung lebih besar.

**Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	442,23	481,05	522,17	588,51	582,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	315,62	332,55	352,28	387,98	378,53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,45	0,46	0,48	0,52	0,55
Pertumbuhan (% ADHK)	5,03	5,36	5,93	10,13	-2,44

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam kurun waktu 2016 – 2019 pertumbuhan konsumsi LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 10,13 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya akibat adanya pemilihan umum (legislatif) serta pemilihan presiden di tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 terjadi kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 2,44 persen sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Cilacap serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.884,28	3.073,75	3.188,80	3.282,35	3.121,20
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.910,45	1.966,87	2.002,37	2.050,33	1.986,81
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,91	2,96	2,91	2,88	2,97
Pertumbuhan (% ADHK)	3,37	2,95	1,80	2,39	-3,10

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku, maupun berdasarkan adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1.639.939,97 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 3.282.346,90 juta rupiah. Pada konsumsi pemerintah adh Konstan 2010 dalam kurun waktu 2010-2019 trennya meningkat, cuma di tahun 2015 terjadi penurunan dibanding tahun 2014 yaitu dari 1.904.938,67 juta rupiah menjadi 1.848.203,29 juta rupiah, atau terjadi kontraksi sebesar 2,98 persen, hal ini bisa terjadi karena komponen terbesar dalam struktur pemerintah adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara di tahun 2019 Konsumsi Akhir Pemerintah tumbuh sebesar 2,39 persen.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa meskipun dari sisi kuantitas dari tahun ke tahun cenderung meningkat akan tetapi proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB dari tahun 2010 tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti yaitu masih pada kisaran 2 persen lebih. Sepanjang periode 2010-2020, proporsi pada tahun 2010 sebesar 2,18 persen, sedangkan sampai dengan tahun 2020 proporsinya tercatat sebesar 2,97 persen. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif seperti penyediaan infrastruktur, kemudahan

dan keterbukaan iklim berusaha, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan lain-lain akan memberikan dampak berantai yang positif juga terhadap perkembangan perekonomian secara umum.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil.

**Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran PMTB
Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Pengeluaran PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	16.925,08	18.507,74	20.572,17	22.625,44	22.137,16
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	12.641,39	13.486,91	14.297,53	15.151,20	14.804,53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	17,09	17,81	18,72	19,83	21,08
Pertumbuhan (% ADHK)	2,70	6,69	6,01	5,97	-2,29

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016 - 2019 terjadi fluktuatif namun tetap tumbuh positif, hanya saja tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 2,29 persen dikarenakan pandemic Covid-19. Selama periode itu pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan tumbuh 2,70 persen, sedangkan pertumbuhannya tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan tumbuh 6,69 persen.

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	256,87	441,95	568,89	431,58	486,09
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	354,86	376,56	346,44	353,58	478,06
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,26	0,43	0,52	0,38	0,46

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Meskipun peranannya relatif kecil namun proporsi perubahan inventori terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Tahun 2010 proporsinya tercatat sebesar 0,14 persen, kemudian di tahun 2020 sebesar 0,46 persen.

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang, yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian.

Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 11. Net Ekspor Antar Daerah Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Antar Daerah					
a. Adh Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	41.748,17	41.844,89	42.729,88	42.306,05	33.861,76
b. Adh Konstan (<i>Miliar Rp</i>)	48.740,66	48.893,24	49.586,03	49.788,15	39.893,72
Kontribusi thd PDRB					
a. Adh Berlaku (<i>Persen</i>)	42,16	40,27	38,95	37,08	32,24
b. Adh Konstan (<i>Persen</i>)	52,49	51,33	50,55	49,63	44,36

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontribusi net ekspor antar daerah dalam kurun waktu 2016-2020 selalu bernilai positif, baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Hal ini menunjukkan nilai ekspor antar daerah lebih besar dari nilai impornya, atau dengan perkataan lain perdagangan antar daerah baik antar kabupaten, antar provinsi maupun luar negeri di Kabupaten Cilacap dengan kabupaten lain selalu mengalami surplus. Komoditas utama ekspor Kabupaten Cilacap ke luar wilayah adalah hasil pengolahan BBM, bahan makanan, semen. Namun demikian, meski masih bernilai positif, di tahun 2020 nilai net ekspor mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilisasi penduduk.

Bab IV

Perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Pengeluaran

<https://cilacapkab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita (berdasarkan PDRB dengan minyak).

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	99.033,57	103.921,78	109.699,66	114.086,33	105.036,03
- ADHK 2010	92.858,65	95.254,59	98.159,05	100.445,73	89.934,72
PDRB per kapita (RibuanRp)					
- ADHB	58.143,03	60.715,80	63.793,89	66.055,25	60.564,59
- ADHK 2010	54.517,71	55.652,04	57.048,65	58.089,52	51.857,06
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHB (%)	(0,35)	4,42	5,12	3,59	-8,40
Jumlah penduduk Pertengahan th (org)	1.703.275	1.711.610	1.719.595	1.727.135	1.734.281
Pertumbuhan (%)	0,51	0,49	0,47	0,44	0,41

* Angka Sementara

** Angka Sangat Semen

PDRB per kapita Kabupaten Cilacap tahun 2020 kontraksi sebesar 8,40 persen, salah satu faktor yang mempengaruhi besaran pertumbuhan PDRB per kapita adalah

jumlah penduduk dan pertumbuhan pada masing-masing tahun. Pada tabel 12 menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Cilacap rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Dari Tabel 12 terlihat bahwa di tahun 2020 nilai tambah atau PDRB per kapita mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019, masih dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19.

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Cilacap digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	36.776,93	39.572,39	42.157,16	44.852,41	44.847,18
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	16.925,08	18.507,74	20.532,76	22.625,44	22.137,17
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,17	2,14	2,05	1,98	2,03

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir di kisaran angka 2. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini relatif stabil selama lima tahun terakhir, namun dengan tren yang sedikit menurun. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai PMTB pada setiap tahunnya.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi Rumah Tangga, LNPRT, dan Pemerintah.

Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 14. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	36.776,93	39.572,39	42.157,16	44.852,41	44.847,18
b. LNPRT	442,23	481,05	522,17	588,51	582,63
c. Pemerintah	2.884,28	3.073,75	3.188,80	3.282,35	3.121,20
Jumlah	40.103,44	43.127,19	45.868,12	48.723,27	48.551,00
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	99.033,56	103.921,78	109.699,66	114.086,33	105.036,03
Proporsi (Persen)	40,49	41,50	41,81	42,71	46,22

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kisaran 40 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Cilacap digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir, yakni konsumsi akhir Rumah Tangga, LNPRT dan Pemerintah. Proporsi konsumsi akhir ini menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020, yaitu dari 40,49 persen pada tahun 2016 naik menjadi 46,22 persen pada tahun 2020.

D. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter Nilai Tambah.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak K unit.

**Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	92.858,65	95.254,59	98.100,57	100.328,44	89.934,72
Perubahan (miliar Rp)	4.501,04	2.395,94	2.845,98	2.227,87	-10.393,72
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	12.641,35	13.486,91	14.297,53	15.151,20	14.804,53
ICOR	2,81	5,63	5,02	6,80	-1,41

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 15 nilai ICOR Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi fluktuatif, tahun 2020 nilai ICORnya tercatat sebesar -1,41. Koefisien ICOR

negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, demikian pula di Kabupaten Cilacap. Hal inilah yang membuat nilai ICOR Kabupaten Cilacap di tahun 2020 bernilai negatif.

Bab V

Penutup

<https://cilacapkab.bps.go.id>

1. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tahun 2020 perekonomian global mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen, terendah selama 10 tahun terakhir.
2. Pertumbuhan ekonomi dunia berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,19 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02 persen.
3. Sejalan dengan perekonomian nasional, perekonomian Jawa Tengah juga mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya sebesar 2,65 persen.
4. Sementara perekonomian Kabupaten Cilacap berdasarkan PDRB pengeluaran tahun 2020 tak luput juga mengalami kontraksi sangat tinggi sebesar 10,36 persen dari pertumbuhan 2,27 persen tahun 2019, apabila dilihat dari non-migas kontraksinya hanya 1,35 persen .
5. Dilihat dari strukturnya, komposisi ekonomi Cilacap didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga serta ditopang oleh nilai ekspor (net ekspor), dan PMTB sehingga komponen tersebut menjadi penggerak utama perekonomian Cilacap.
6. Dalam PDRB Kabupaten Cilacap menurut pengeluaran, *Nett Ekspor* merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi yaitu sebesar 19,87 persen dan pertumbuhan tertinggi pada Perubahan inventori yaitu 35,21 persen.
7. Peranan investasi dalam perekonomian menjadi sangat penting, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Cilacap dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Tahun 2020 proporsi PMTB ini tercatat sebesar 21,08 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Cilacap pada kisaran 21 persen.
8. Dilihat dari sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Adh Konstan dari total kontraksi sebesar 10,36 persen di tahun 2020, kontraksi terbesar 19,87 persen merupakan andil dari *Nett Ekspor*, baru diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang memberikan andil kontraksi sebesar 3,10 persen.

Lampiran

<https://cilacapkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Komponen Pengeluaran
(Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	36.776.934,83	39.572.388,55	42.157.156,77	44.852.410,48	44.847.179,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	442.230,54	481.052,04	522.167,59	588.510,23	582.627,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.884.279,54	3.073.750,32	3.188.798,76	3.282.346,90	3.121.203,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.925.079,33	18.507.740,00	20.532.759,26	22.625.435,17	22.137.165,68
5. Perubahan Inventori	256.871,00	441.950,29	568.893,39	431.576,00	486.088,86
6. <i>Net Ekspor</i>	41.748.170,42	41.844.894,83	42.729.882,98	42.306.048,77	33.861.760,81
PDRB PENGELUARAN	99.033.565,66	103.921.776,03	109.699.658,75	114.086.327,55	105.036.025,08

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran
(Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	28.895.722,88	30.198.458,80	31.515.920,20	32.597.205,82	32.393.078,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	315.615,70	332.548,24	352.278,85	387.975,82	378.526,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.910.445,75	1.966.870,14	2.002.370,69	2.050.325,99	1.986.806,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.641.348,51	13.486.907,93	14.297.527,58	15.151.201,29	14.804.527,74
5. Perubahan Inventori	354.856,31	376.557,27	346.438,64	353.583,02	478.063,96
6. <i>Net Ekspor</i>	48.740.660,69	48.893.244,32	49.586.032,21	49.788.146,81	39.893.717,59
PDRB PENGELUARAN	92.858.649,84	95.254.586,70	98.100.568,17	100.328.438,75	89.934.720,46

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	37,14	38,08	38,43	39,31	42,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,45	0,46	0,48	0,52	0,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,91	2,96	2,91	2,88	2,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,09	17,81	18,72	19,83	21,08
5. Perubahan Inventori	0,26	0,43	0,52	0,38	0,46
6. <i>Net Ekspor</i>	42,16	40,27	38,95	37,08	32,24
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3,63	4,51	4,36	3,43	-0,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,03	5,36	5,93	10,13	-2,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,37	2,95	1,80	2,39	-3,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,70	6,69	6,01	5,97	-2,29
5. Perubahan Inventori	19,34	6,12	-8,00	2,06	35,21
6. <i>Net Ekspor</i>	6,61	0,31	1,42	0,41	-19,87
PDRB PENGELUARAN	5,09	2,58	2,99	2,27	-10,36

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Menurut Komponen Pengeluaran (Tahun 2010=100)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	127,27	131,04	133,76	137,60	138,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	140,12	144,66	148,23	151,69	153,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	150,97	156,28	159,25	160,09	157,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	133,89	137,23	143,61	149,33	149,53
5. Perubahan Inventori	72,39	117,37	164,21	122,06	101,68
6. <i>Net Ekspor</i>	85,65	85,58	86,17	84,97	84,88
PDRB PENGELUARAN	106,65	109,10	111,82	113,71	116,79

* angka sementara

** angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Perubahan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Menurut Komponen Pengeluaran (Tahun 2010=100)
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2,23	2,96	2,08	2,86	0,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,23	3,24	2,47	2,34	1,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,91	3,51	1,90	0,53	-1,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,44	2,50	4,65	3,98	0,13
5. Perubahan Inventori	-74,61	62,14	39,91	-25,67	-16,70
6. <i>Net Ekspor</i>	-11,58	-0,08	0,69	-1,39	-0,11
PDRB PENGELUARAN	-4,70	2,30	2,50	1,69	2,71

* angka sementara

** angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP**

Jalan Dr. Sutomo 16A Cilacap 53212,; Telp. (0282) 534328;

Fax. (0282) 535011; E-mail: bps3301@bps.go.id Homepage: <http://cilacapkab.bps.go.id>